

PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KELURAHAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MAASING KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO

ISMAIL RACHMAN

Community Empowerment Institution or LPM in Indonesian language is an organization formed by society initiatively as a partnership organization with the government to contain and deliver the society's opinion especially about development.

The position of LPM in the society is very important and strategic because this institution is the tool to deliver and contain the aspiration of the society and also an organization to encourage the society to participate in every aspect of development in the village. LPM basically is giving more space in implementing the democracy especially for the society.

LPM as the partner of the government can contain, facilitate and deliver the message or aspiration from the society. The other activity of LPM is facilitate every activity through the program that has been proposed before by the society.

Keyword: Program Development, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang lebih bertumpu pada pemberdayaan manusia tentu tidak bisa disulap dengan ukuran kecepatan waktu dan tempat melainkan dengan proses berkesinambungan dalam bentuk peningkatan pada partisipasi aktif dari semua unsur termasuk *stake holders*.

Aktifitas pembangunan manusia tentu tidak dapat berjalan sendiri, sehingga memerlukan dukungan yang lebih kompleks dan mapan. Kemapanan pembangunan manusia dapat berproses apabila terjalin dukungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Strategy pembangunan yang berorientasi pada Top down Planning (dari atas kebawah) sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (2003) tidak mungkin dapat berjalan secara simultan tanpa adanya pendekatan Bottom Up (dari bawah keatas). Oleh karena itu strategy pembangunan yang bertumpu pada Top down planning dan bottom up planning dapat dilakukan secara simultan. Seperti yang dapat kita lihat pada konsep pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat Kelurahan dimana Lurah sebagai wakil dari pemerintah memegang peranan

yang strategis, sedangkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan lebih diberdayakan secara terus menerus.

Pandangan ini lebih merefleksikan hubungan antara pemerintah kelurahan dengan kelembagaan masyarakat sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan. Pemerintah Kelurahan tentu memiliki partner yang sangat strategis dalam mengimplementasikan pembangunan dengan memanfaatkan potensi masyarakat lewat kelembagaan yang ada. Sehingga antara pemerintah kelurahan dan masyarakat lewat kelembagaan merupakan dua pelaku pembangunan yang tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, maka campur tangan pemerintah kelurahan serta lembaga-lembaga yang ada diharapkan dapat berperan semaksimal mungkin. Disamping itu peran aparatur pemerintah sebagai fasilitator dinamisator dalam menunjang pelaksanaan pembangunan perlu dimantapkan.

Dalam kaitannya dengan apa yang dikemukakan diatas maka ada beberapa hal yang ingin dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah khususnya di tingkat kelurahan yaitu perlu meningkatkan

peran lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di kota maupun di desa agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap program pembangunan demi terlaksananya pelaksanaan otonomi daerah yang mantap dan berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan lembaga kemasyarakatan yakni melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah kelurahan memiliki peranan dan membina hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan kelembagaan yang ada haruslah bersifat saling mengisi, tanpa adanya intervensi dari masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan menitikberatkan pada Pengembangan program kemitraan antara Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Populasi adalah totalitas atau karakteristik dari suatu nilai (Masri Singarimbun, 2001). Sedangkan Populasi menurut K.J. Veeger (2003) adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Jadi yang dimaksudkan dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karakteristik yang berhubungan dengan pengembangan program kemitraan antara Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Menurut K.J. Veeger (2003) Populasi heterogen adalah sumberdata yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya. Populasi heterogen dalam penelitian sosial dan obyeknya manusia atau gejala dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu penentuan sampel responden ditentukan secara acak antara lain:

- Sampel Pegawai ditetapkan 10 orang
- Sampel Keanggotaan LPM ditetapkan 10 orang
- Sampel Kepala Keluarga pada empat lingkungan ditetapkan sebanyak 40 orang yakni tiap lingkungan ditetapkan 10 orang.

Dengan demikian jumlah seluruh sampel respondennya adalah berjumlah 60 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif dengan menganut pendekatan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain .

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana tujuannya adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan dan aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang lebih bertumpu pada pemberdayaan manusia tentu tidak bisa disulap dengan ukuran kecepatan waktu dan tempat melainkan dengan proses berkesinambungan dalam bentuk peningkatan pada partisipasi aktif dari semua unsur termasuk *stakeholders*.

Aktifitas pembangunan manusia tentu tidak dapat berjalan sendiri, sehingga memerlukan dukungan yang lebih kompleks dan mapan. Kemapanan pembangunan manusia dapat berproses apabila terjalin

dukungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan lembaga kemasyarakatan yakni melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat yang dalam fungsinya membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, maka dengan fungsi tersebut diharapkan akan dapat menciptakan suatu suasana yang menunjang pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang hal ini tergantung sejauhmana masyarakat menyadari dan memberikan kontribusi bagi terciptanya suasana yang kondusif tersebut.

Secara organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat berdiri sendiri dan bersifat lokal, artinya lembaga pemberdayaan masyarakat tidak berada di bawah atau diatas suatu organisasi lainnya serta tidak mempunyai cabang ditempat lain (kelurahan yang lain). Dalam menjalankan kegiatannya lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi memotivasi dan menggerakkan masyarakat serta membimbing kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; memotivasi dan mengidentifikasi permasalahan dan sumberdaya pembangunan, menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat sebagai langkah menetapkan koordinasi kelurahan dan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan.

Dalam melaksanakan kegiatannya lembaga pemberdayaan masyarakat membantu Lurah dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari program pemerintah maupun yang berasal dari aspirasi

masyarakat. Adapun tugas lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: membantu pemerintah kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat; membantu pemerintah kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pembangunan, dan menumbuh kembangkan dinamika kelompok masyarakat dalam proses pembangunan,

Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam pelaksanaan demokrasi khususnya bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

LPM sebagai lembaga independen yang turut membantu kesinambungan dalam tata pemerintahan di Kelurahan sebagai suatu lembaga yang diharapkan akan mampu membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi, hal ini akan dicerminkan dari mulai bangkitnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan pendapat dan pandangan diantara mereka.

Melalui LPM rakyat mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pembangunan. Adat istiadat, norma-norma mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan yang ada di Kelurahan.

Kalau diamati tentang peranan LPM dalam mengayomi masyarakat maka sangat membantu pemerintah Kelurahan khususnya dalam menyusun berbagai program pembangunan, memfasilitasi berbagai kegiatan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun yang telah diprakarsai oleh masyarakat setempat.

Dengan ditingkatkannya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka berbagai program pembangunan seperti pembangunan jalan setapak, selokan air, penyediaan air bersih ,

pembangunan sarana ibadah, dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan walaupun sebelumnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun sekarang rakyat mulai merasakan manfaatnya. Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Maasing seperti melindungi adanya bahaya abrasi pantai karena desa ini juga sangat dekat dengan lokasi pantai dan berada di dataran rendah.

Bila dikaji sebelum dibentuknya Lembaga Pemberdayaan masyarakat maka perkembangan sarana pembangunan fisik dan prasarana fisik dulunya dapat dikatakan belum memadai karena lingkungan fisik di daerah ini cukup parah sebab sebagian besar rumah penduduk apabila turun hujan maka akan tergenang air dengan ketinggian 1 – 2 Meter pada rumah penduduk yang ada di dataran rendah hal ini terjadi pada kondisi di tiap-tiap lingkungan yang ada. Sarana jalanpun tertimbun lumpur, jalan yang dulunya dapat dilalui dengan kendaraan roda empat kini hanya bila dilalui dengan pejalan kaki. Bahkan penduduk setempat mulai membangun talud untuk penimbunan dengan harapan untuk mencegah kembali akibat terjadinya hujan maka rumah mereka akan terhindar, walaupun pembangunan talud akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibat pembuatan talud di pinggir jalan induk yang dapat dilalui dengan roda empat maka jalan induk tertimbun setinggi 2 meter, artinya jalan induk dibawah dari pembuatan talud yang telah dibuat oleh masyarakat. Salah satu permasalahannya adalah bahwa kondisi saluran air yang menghubungkan jalan air (GOT) dari saluran air yang satu ke saluran air lainnya di wilayah ini telah terjadi pendangkalan pada semua selokan air. Pendangkalan ini terjadi karena adanya pengaruh lumpur yang tebal serta sampah yang dibuang oleh masyarakat setempat. Tertimbunnya rumah penduduk dan rusaknya sarana jalan di wilayah ini akibat kondisi

lingkungan yang sangat memprihatinkan karena wilayah ini memiliki dataran rendah. Jadi kerusakan lingkungan di wilayah ini juga akibat dari dataran rendah yang sudah terbentuk lama kemudian dipengaruhi oleh endapan lumpur pada berbagai saluran air yang ada didalam GOT. Dengan kondisi lingkungan yang kurang baik kini menambah beban penduduk dalam soal pelayanan terhadap infra struktur. Beban lain yang dapat dirasakan oleh penduduk adalah karena terjadi kondisi lingkungan secara drastis sebagai akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui proyek APBD maupun proyek-proyek lainnya yang berdampak pada semakin rendahnya dataran wilayah di Kelurahan Maasing. Setiap musim hujan yakni pada bulan desember selalu dilalui dengan Lumpur sehingga kondisi fisik lingkungan sudah sangat buruk atau beban lingkungan tidak mampu memenuhi keseimbangan ekosistem. Akibat kelangkaan infra struktur di wilayah ini menyebabkan kelangkaan terhadap proses kelembagaan dan aktivitas masyarakat terutama dalam memenuhi jalur transportasi roda dua dan roda empat. Keterbelakangan sarana transportasi secara langsung juga akan mempengaruhi keterbelakangan dalam struktur sosial didalam masyarakat.

Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kini mampu mengubah keadaan dimana kondisi lingkungan yang dulunya kurang baik dan kurang mendukung maka segala permasalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan berbagai kegiatan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga mitra pemerintah mampu menampung, memfasilitasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan lain dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah memfasilitasi berbagai kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah tingkat atas lewat program yang telah diusulkan oleh masyarakat. Adapun secara garis besar rincian kegiatan bagi pengembangan program yang pernah dilakukan oleh Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat antara lain dengan meningkatkan pengembangan program Infra struktur Beberapa program yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Kelurahan Maasing t antara lain :

1. Pembuatan jalan setapak baru
2. Rehabilitasi jalan setapak
3. Pembuatan saluran air baru
4. Rehabilitasi saluran air,
5. Pembuatan Papan penunjuk Lingkungan, Kelurahan
6. Pengerasan jalan
7. Rehabilitasi jalan
8. Pengeboran air bersih. (Catatan , Pada beberapa Lingkungan).

Pengembangan program pembangunan infra struktur di Kelurahan Maasing melalui berbagai usulan kegiatan yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat kini mampu mengubah keadaan lingkungan fisik dan kenyamanan bagi masyarakat setempat. Kondisi lingkungan yang dulunya tertimbun lumpur kini jalan induk kembali berjalan dengan normal yakni sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat, serta mendukung percepatan roda perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat dapat merasakan kenyamanan untuk berjalan di jalan setapak, perbaikan kondisi jalan induk yang sudah diaspal kembali, saluran air kini dapat berjalan dengan baik, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari penggalian sumur air bor yang telah difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Proyek Fisik yang pernah dibuat dan diusulkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan dana yang dibiayai oleh PKPS-BBM kegiatan infra struktur Perdesaan dengan biaya Rp. 250.000.000 dan dana dari PNPM , kini mampu mengubah keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan fisik walaupun masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan tetapi dampak yang dirasakan oleh

masyarakat terhadap kehadiran lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cukup besar.

B. Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah membawa perubahan mendasar dalam meningkatkan kemandirian bagi masyarakat dan pemerintah Kelurahan, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga mitra harus dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan untuk mengatasi berbagai kegiatan yang ada dilingkungannya.

Sampai dengan saat ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sebagai lembaga mitra yang dapat mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat, membangkitkan gairah partisipasi, serta merubah pola berpikir masyarakat ke arah yang lebih terbuka. Dengan beberapa realisasi program LPM yang sudah dilaksanakan terbukti dapat menyelesaikan berbagai agenda kegiatan yang penting yang dapat mengatasi kondisi perubahan social masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan pada khususnya. Selain itu LPM harus mampu membina kehidupan demokrasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat .

Jika dibandingkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pada waktu-waktu yang lalu, dimana LKMD hanya menjadi symbol dan kepanjangan pemerintah Desa dan Kelurahan dan sepenuhnya bergantung pada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, Saat ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan

wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan pembangunan yang ada di kelurahan . Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan, mengingat kedudukannya sebagai lembaga mitra pemerintah di kelurahan yang benar-benar mampu menjembatani berbagai kepentingan program pembangunan baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun program-program pembangunan yang diusulkan dari bawah/dari masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah Kelurahan Lembaga Pemberdayaan masyarakat harus dapat bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan untuk menggalakkan berbagai kegiatan pembangunan termasuk membangkitkan semangat gotong royong serta mengusulkan berbagai program pembangunan.

Apabila diamati maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat saat ini telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih ditemukan berbagai macam kendala, keberhasilan LPM telah dapat menyelesaikan berbagai agenda kegiatan yang penting menyangkut pemulihan kepekaan lingkungan yang dulunya dianggap rentan, kurang berfungsi, roda perekonomian tidak berjalan dengan baik, kini dengan hadirnya Lembaga Pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Dengan memahami kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut, diharapkan dapat melakukan perannya dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dengan baik dan dinamis. Sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila LPM dituntut untuk melakukan peran.

- = Mengenalkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan khususnya
- = Membina kehidupan demokrasi

- = Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Saat ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan berbagai kebijakan pembangunan. Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan, mengingat kedudukannya sebagai Lembaga mitra sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan ditingkat pemerintah Kelurahan /Kecamatan maupun ditingkat atasnya.

Sebagai mitra pemerintah Kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan partner bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai mitra pemerintah Kelurahan menyebabkan diantara keduanya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

Walaupun Lurah menjadi partner dari LPM namun dia tidak bisa memberhentikan LPM karena LPM telah dipilih oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya dari tiap lingkungan. Sebaliknya juga Lurah tidak dapat membubarkan LPM artinya keduanya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkannya selain berdasarkan pada aturan-aturan yang jelas.

Berdasarkan kedudukan dan peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh LPM tersebut maka tidak berlebihan kiranya pemerintah Kelurahan mengharapkan perlunya memberdayakan LPM khususnya dalam menempatkan LPM dan pemerintah Kelurahan secara proporsional dalam konstelasi pemerintahan dan pembangunan maka akan terwujud suatu sistem politik yang dibangun dan disepakati dari bawah, sehingga pada gilirannya akan terwujud pemerintahan yang mandiri dan kuat. Dalam perspektif pemerintah kondisi masyarakat yang kuat dan

mandiri tersebut sangat menguntungkan bagi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dampak dari pemberdayaan LPM dan pemerintah Kelurahan diharapkan akan mampu meningkatkan:

- = Proses Demokrasi
- = Peran serta masyarakat
- = Pemerataan dan keadilan
- = Memperhatikan potensi dan keanekaragaman

Upaya pemberdayaan LPM dan pemerintah Kelurahan juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membangun proses dan implementasi Good governance yang dikembangkan di masing-masing wilayah diseluruh Indonesia, yang intinya juga akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat. (Dadang Juliantara,2000).

Menurut Herry.S. Dalam Purwo Santoso (2002) bahwa kepentingan LPM dapat berperan sebagai suatu upaya untuk:

1. Kemandirian Desa dalam kaitan dengan :
2. Proses pengambilan keputusan
3. Hak untuk mengelola sumberdaya desa
4. Pengelolaan konflik di desa dengan mekanisme yang dimiliki.
5. Hak untuk memilih pemimpinnya sendiri
6. Terjaganya harmonisasi antar Lurah dengan LPM
7. Peran partisipasi pengawasan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat atasnya akan terlaksana dengan baik
8. Mendorong keberanian masyarakat dalam mengambil dan menyuarakan aspirasi, sehingga memiliki *bargaining position* yang cukup kuat.

Dalam mengoptimalkan hubungan kerja antara LPM dengan pemerintah Kelurahan maka diperlukan pemahaman tentang konsep KISS (Koordinasi Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi).

Dengan konsep ini diharapkan akan memperkuat kemandirian LPM dan pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya terutama adanya pembagian pengaturan kekuasaan yang jelas.

Berdasarkan kedudukan dan peran LPM maka tidak berlebihan kiranya bahwa pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap prospek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demokrasi pada masa yang Akan datang. Dengan menempatkan LPM dan pemerintah Kelurahan secara proporsional dalam konstelasinya maka Akan berwujud suatu sistem politik yang dibangun dan disepakati dari bawah sehingga pada gilirannya Akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dan kuat. Dalam perspektif pemerintah kondisi kelembagaan yang kuat dan mandiri tersebut sangat menguntungkan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian penciptaan hubungan kerja antara LPM dengan pemerintah Kelurahan sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Lurah dan LPM. LPM merupakan wakil rakyat yang fungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan pemerintahan mengingat pentingnya peran LPM, maka harus didukung upaya untuk senantiasa para anggotanya sehingga mampu meningkatkan kualitas menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan, langsung dibawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintah umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepala Kelurahan (Lurah) adalah penyelenggara/penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah Kelurahan terdiri dari kepala Kelurahan (Lurah) dan perangkat Kelurahan, sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa Lembaga Pemberdayaan masyarakat adalah suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan
 3. Kedudukan atau posisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat penting dan strategis karena lembaga ini merupakan sarana pemberdayaan yang dapat menampung, menyalurkan serta mewujudkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam pelaksanaan demokrasi khususnya bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
 4. Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga mitra pemerintah mampu menampung, memfasilitasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan lain dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah memfasilitasi berbagai kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah tingkat atas lewat program yang telah diusulkan oleh masyarakat.
 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memberikan tanggapan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari dampak terhadap pemanfaatan proyek fisik yang pernah dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Bahwa pemanfaatan proyek yang telah diprakarsai oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah cukup bermanfaat, artinya dapat menyentuh kebutuhan masyarakat setempat.

6. Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah membawa perubahan mendasar dalam meningkatkan kemandirian bagi masyarakat dan pemerintah Kelurahan, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga mitra harus dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan untuk mengatasi berbagai kegiatan yang ada dilingkungannya.

B. Saran-saran

1. Mengingat peran LPM sangat penting dan strategis, maka disarankan perlunya lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara Lurah dan LPM itu sendiri dalam melaksanakan berbagai pembangunan yang ada.
2. Sistem perencanaan proyek yang diusulkan dan diimplementasikan hendaknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat, serta diperlukan adanya transparansi dari setiap pimpinan LPM maupun keterbukaan dari Lurah dalam membangkitkan kepercayaan dan gairah partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, 1993, Administrasi Pemerintahan Desa, CV Rajawali Jakarta.
- C.S.T Kansil , 2001, Pemerintahan Daerah, Pradnya Paramita

- Flippo, Edwin., 1995. Manajemen Personalialia, edisi ke – 6 jilid I, terjemahan Mohammad mas'ud. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kartasasmita Ginanjar,1995, Pemberdayaan Masyarakat,Penerbit Alumni Bandung.
- Hikmat Harry,2001, Strategi pemberdayaan masyarakat, Bandung Humaniora Utama Press.
- Islamy, Irfan, M, Drs, MPA, 1986. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
- Joko Siswanto Drs , 1994, Administrasi Pemerintahan Desa, CV Rajawali Jakarta.**
- K.J. Veeger, Pengantar Metodologi Penelitian , Asosiasi perguruan tinggi Katholik (APTIK) bekerjasama dengan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mc. Kinney, Jerome B. Lawrence, C. Howard , 1987, Public Administration : Balancing Power and Accountability Osk Park, Illinois : Moore Publishing Company ,Inc.
- Nisjar.S. Karthi 1995, Manajemen strategik, Bandung Mandar maju.
- Ndraha 2003 ,Pembangunan masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat tinggal landas, PT Gramedia Jakarta.
- Prijo.S. dan Pranarka,1996, Pemberdayaan Konsep,Kebijakan dan Implementasi, CSIS,Jakarta.
- Reardon .G. 1994, Woment and the environment , Oxford ,oxfam publication.
- Sadu Wasistiono, 2006, Manajemen Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah,
- Sugiyono 2003, Metode Penelitian Administrasi, Pradnya Paramita.
- Sutrisno Hadi, 2001, Metode penelitian sosial, Pradnya paramita.
- Suryasubrata Adi, 1990 , Otonomi Daerah, Penerbit Pradnya Paramita
- Suhendra 2003, Pemberdayaan Lembaga Politik, Yayasan Dian Desa.
- Sedarmayanti, 2005, Good Govennment, membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas meuju good government ,Penerbit CV Mandar Maju.
- Tim Lapera 2000, Politik pemberdayaan Jalan menuju Otonomi Desa, Lapera Pustaka Utama,
- Tumar Sumihardjo 2006. Daya saing potensi Daerah, Penerbit Fokus Media Jakarta.
- Sumber-Sumber Lain :
- UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Kelurahan